

**PENERAPAN GUGATAN *CLASS ACTION* DILUAR
KETENTUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/Pdt.G/2018/PN MRJ
STUDI KASUS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang Tugas Akhir
Dan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana

Di Susun Oleh:

RIZKY WAHYU PUTRA PRATAMA

41151010150095

Program Kekhususan Hukum Keperdataan

Di Bawah Bimbingan

AEP SULAEMAN, S.H.,Sp.1.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**THE APPLICATION OF CLASS ACTION LAWSUITS OUTSIDE
THE PROVISIONS OF PERMA NUMBER 1 OF 2002
CONCERNING GROUP REPRESENTATIVES LAWSUIT IN
COURT DECISION NUMBER 3/Pdt.G/2018/PN MRJ
CASE STUDY**

Submitted to Meet One of the Requirements to Take a Final Assignment and Obtain a
Law Degree from Langlangbuana University

Arranged by:

RIZKY WAHYU PUTRA PRATAMA

41151010150095

Specialization Program in Civil Law

Under the guidance of

AEP SULAEMAN, S.H.,Sp.1.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Wahyu Putra Pratama

NPM : 41151010150095

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : **PENERAPAN GUGATAN *CLASS ACTION* DILUAR KETENTUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/Pdt.G/2018/PN MRJ**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas ini adalah karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana kondisi saya dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan

Rizky Wahyu Putra Pratama

ABSTRAK

Studi kasus ini membahas mengenai penerapan gugatan *class action* diluar ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Dalam Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN MRJ. Gugatan *class action* merupakan suatu prosedur pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, serta memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Dalam hal ini jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan, terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Pada proses awal pemeriksaan persidangan, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class action* sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, jika gugatan tersebut termasuk kriteria gugatan *class action* maka gugatan tersebut dapat dilanjutkan di pengadilan tetapi apabila gugatan tersebut tidak termasuk kriteria gugatan *class action* Hakim dapat memberhentikan gugatan tersebut dalam bentuk putusan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normaif yang bertitik pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum dari norma hukum, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang di lakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahap kepustakaan. Data yang di lakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum kemudian data tersebut di susun dan di analisa melalui metode deskriptif analisis.

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Kelas II dalam memberikan putusan ada beberapa hal yang memang kurang tepat dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim, berdasarkan isi gugatan yang diutarakan penggugat. Dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat yaitu dapat diajukan kembali dengan tata cara gabungan gugatan atau gugatan biasa.

ABSTRAK

The study of this case discussed regarding the application of action is outside of the PERMA of the PERMA, 2002 on the presence of a group at the court of the secretary of the court 3/Pdt.G/2018/PN MRJ. A class action is a light entertainment, where one or more or more, representing a group for a person, and is a group for a person, and is a group of people, and has a common fact or the similarity of a basic law between the group and group members. In this case the number of members of the group is in order to be more effective and efisien if it is done by themselves sendiri or simply together in a single, there is the fact of the fact or the events and the similarity of the basic law that is used to clean it, as well as a common mix of the group's claim for the group of group members. At the initial process of trials, the judge was contested and considering the criteria for the sense of taking class to have been arranged in the PERMA'S number 1 year 2002 on the show's sense of the group, if it included the criteria for a class action that there may be questioned at the court but otherwise uncredited with the performance of the judge's class that could not leave them in the context of the forms.

The study uses the *yuridis normatif* approach to the analysis of the regulation of statutory rules with the use of law of law, the law of law and statutory regulations. A phase is conducted in composed of this research with the object stage. The data performed in a manner derived from legal materials was then assembled and analyzed through a descriptive method of analysis.

The conclusion of this study is the court of court judges of muaro country in order to have some of the cultures there are several less precise and does not in accordance with the statutory regulations which applies in indonesia to any of the conduct of the council of justice, based on the content of the letters. In the case of the council's majlis, the council of judges provided a law consideration of the PERMA'S number 1 years 2002. Legal efforts that may be sought to be refiled with a crossdressing manner or ordinary.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus yang berjudul **“PENERAPAN GUGATAN CLASS ACTION DI LUAR KETENTUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/Pdt.G/2018/PN MRJ”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Bapak Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1. selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya studi kasus ini.

Perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Dini Ramdania S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Dr. Jafar Sidik, S.H.,M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan motivasi yang baik serta semangat kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan Rivaldi Nurfikri Alghifari, Sendira Fuadina, Yogi Dirgantara, Fit Joshua, Aditya Insani, Rudi Setiawan, Reza Faadli NR dan Rizki Malinto R, kelas A2 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2015 dan

KKNM 14 Desa Cikao Bandung, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Teman – teman di organisasi yang selalu mendukung dan menghiasi masa – masa kuliah penulis yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar saya yaitu Ibunda Eliyatun, Ayahanda M. Tasli, dan Adik Safira Maulida Agustin. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan. Dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca.

Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Bandung, 13 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	10

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORETIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj	15
2. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj	15

B. Tinjauan Teoretik

1. Tinjauan Umum Mengenai Gugatan <i>Class Action</i>	15
2. Unsur-unsur <i>Class Action</i>	20

3. Persyaratan Formal Surat Gugatan dan Persyaratan Gugatan <i>Class Action</i>	22
4. Tahapan dalam Proses Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok.....	32
5. Asas- asas Hukum Acara Perdata	34
6. Bentuk Putusan Hakim	40
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	
A. Ringkasan Putusan	42
B. Pertimbangan Hukum	52
BAB IV ANALISIS PENERAPAN GUGATAN <i>CLASS ACTION</i> DILUAR KETENTUAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/Pdt.G/2018/PN MRJ	
A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj	56
B. Upaya Hukum yang dapat dilalui Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Kelas II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj.....	63
BAB V KESIMPULAN	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	